



buletin

# Parlementaria

Nomor 958/III/V/2017 • Mei 2017

**Gagasan Pendidikan  
Ki Hadjar Membakar  
Benih Kobodohan**

**Sertifikasi Tanah  
Lambat, Legislator  
Evaluasi Prona**



**Warga Binaan  
Lapas Palu  
Sampaikan  
Keluhan**

TIDAK  
DIPERJUAL-  
BELIKAN

# Warga Binaan Lapas Palu Sampaikan Keluhan

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Petobo, Palu, Sulawesi Tengah guna mengecek keadaan lapas dari aspek keamanan hingga pembinaan yang dilakukan pada Selasa. Warga binaan Palu menyampaikan keluhan kepada Komisi III.

Kunjungan Komisi III ini kemudian dimanfaatkan oleh narapidana untuk berbagi kisah terkait keadaan lapas. Sekitar satu jam, para anggota Komisi III DPR RI melihat dari dekat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Lapas anak dan perempuan, ruang keterampilan, dapur umum, dan ruang-ruang tahanan. Sejumlah warga binaan memanfaatkan kunjungan Komisi III DPR RI ini untuk mencurahkan isi hati mereka.

"Pak kami minta keadilan agar ditegakkan," kata warga binaan kasus tororisme yang dihukum 5 tahun penjara.

Ia meminta Komisi III DPR RI membantu mereka, agar teman-temannya yang ditahan di Lapas di sejumlah kota di Indonesia yang memiliki keluarga dan istri serta anak dikembalikan ke Sulteng.

"Ada beberapa teman kami yang menjalani masa hukuman di luar daerah seperti di Manado, Nusa Tenggara, dan Maluku untuk dikembalikan dekat dengan keluarganya," ujar salah satu narapidana.

Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K Harman pun merespon aspirasi tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjutinya dalam rapat dengan pemerintah pusat. "Ya untuk

itu kami datang ke sini. Salah satunya agar bisa mendapat informasi dan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga binaan," ujar Benny.

Turut serta dalam kunjungan ini, Risa Mariska, Agun Gunandjar, Nawafie Saleh, Supratman Andi Agtas, Moreno Soeprapto, Erma Suryani Ranik, Abdul Kadir Karding, Bahrdin Nasori, TB Soenmandjaya, dan Ahmad Ali. Ikut mendampingi kunjungan ini antara lain Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Sulteng Iwan Kurniawan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Tholib. ■

(hs), Foto: hendra/hr



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Benny K Harman berdialog dengan warga binaan Lapas Palu



# DPR RI Sahkan Tiga RUU dalam Masa Sidang IV Tahun 2016-2017

Pada Masa Sidang IV yang terhitung mulai 15 Maret sampai dengan 17 Mei 2017, DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui tiga RUU. Adapun ketiga RUU yang telah disetujui DPR RI adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu juga Sidang Paripurna menyetujui RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sambutannya mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama menuntaskan tanggung jawab ini. Tahapan selanjutnya menjadi kewajiban bagi anggota untuk mensosialisasikan beberapa undang-undang yang telah disahkan di atas melalui kunjungan kerja pada masa reses.

"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I dan Komisi X DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU di atas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Fraksi serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI atas kerjasamanya," ujar Novanto saat berpidato di Ruang Paripurna Nusantara II, Jumat (28/4).

RUU Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina bertujuan agar permasalahan yang terkait penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina dapat menciptakan kepastian hukum terhadap kedaulatan wilayah, ruang. Selain itu juga bermanfaat untuk ekonomi, melalui sumber daya alam di Kawasan ZEE Republik Indonesia.

Adapun RUU tentang Sistem Perbukuan, DPR RI beranggapan buku merupakan salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat UUD 1945. Dengan disahkannya RUU tentang Sistem Perbukuan diharapkan keterbatasan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu, murah dan merata, baik buku pendidikan maupun buku umum yang selama ini menjadi kendala dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat teratasi. Selain itu, Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan yang komprehensif juga melindungi seluruh pelaku perbukuan.

Adapun RUU tentang Pemajuan Kebudayaan adalah salah satu investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Dalam Pasal 32 UUD 1945 diamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan disahkannya undang-undang ini diharapkan keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa dapat lebih berperan dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia. ■



Pidato Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Sidang Paripurna

(eko.mpp), Foto: Iwan/fhr

- PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**  
Bagus Mudjiharjanto
- ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,  
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah
- ADMINISTRASI FOTO**  
Hasri Mentari
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



**PENERBITAN**  
Pimpinan Penerbitan  
Djustiawan Wijaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**Penanggung Jawab Produksi**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**Staf Produksi**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

**Distribusi dan Sirkulasi**  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**Koordinator**  
Mujiono

**Staf Distribusi dan Sirkulasi**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,  
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**



## RUU LPM dan PUTS Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR RI

Pimpinan DPR RI menerima pandangan secara tertulis dari sepuluh Fraksi terkait RUU LPM dan PUTS

Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara II, Jumat (28/4) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM dan PUTS) menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI.

**S**ebelumnya, sepuluh Fraksi di DPR RI dengan mengutus juru bicara masing-masing telah menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Pandangan-pandangan tersebut berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM dan PUTS). Setelah selesai penyampaian, Fahri Hamzah menanyakan kepada para anggota dewan.

"Kini saatnya saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi VI DPR RI tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM & PUTS), dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?" tanya Fahri, serentak dijawab "setuju."

Ketuk palu menjadi penanda persetujuan. Persetujuan DPR RI ini dengan mempertimbangkan pembangunan bidang ekonomi yang harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di sisi lain, demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Hal ini juga, guna terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Praktik monopoli yang dimaksud dalam RUU ini adalah penguasaan kekuatan ekonomi berupa produksi, pemasaran, atas barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan persaingan usaha juga untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, guna menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun pelaku usaha kecil. ■

(eko.mp), Foto: Azka/hr



# Sistem Proporsional Terbuka Partisipasi Publik Lebih Besar

Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI. Antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup terus dikaji mendalam, mana yang paling ideal untuk sistem pemilu di Tanah Air.

“ Saya melihat dengan sistem proporsional terbuka akan jauh lebih besar partisipasi publiknya. Dan ini tentu saja akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat kita akan memilih calon-calon terbaik yang ada,” papar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan sambutan pada Sekolah Parlemen Kampus 2017 di Aula Kantor Bupati Karawang, Sabtu (29/04).



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota DPR RI dan pejabat Sekjen DPR RI dalam acara Sekolah Parlemen Kampus 2017

Sebagaimana diketahui, dalam sistem proporsional terbuka yang sudah diterapkan selama dua periode

pemilihan, mereka yang terpilih menjadi legislator adalah yang menuai suara

terbanyak. Sementara, dalam sistem proporsional tertutup, ada party list. Parpol mempunyai list 1 sampai 9 dan yang akan terpilih adalah sesuai nomor urut. Pada sistem ini yang akan banyak bekerja adalah mesin partai.

“Sementara dalam sistem proporsional terbuka yang akan lebih banyak bekerja adalah bakal calon anggota legislatif. Caleg nomor urut 1 sampai 9 semuanya mempunyai kesempatan yang sama,” jelas Fadli. Dan pada sistem proporsional tertutup, sambungnya, kesempatan itu hanya ada di nomor urut 1 atau 2, tergantung dari kekuatan parpol tersebut.

“Artinya, dalam pemilu nanti, partisipasi publik jauh lebih tinggi pada sistem proporsional terbuka, karena semua caleg akan melakukan sosialisasi ke semua arah dapil dan semua elemen masyarakat,” terangnya. dengan sistem ini juga akan jauh lebih meriah, karena semua caleg menggunakan berbagai macam strategi untuk melakukan pendekatan pada konstituennya masing-masing, sambungnya.

“Sementara sistem proporsional tertutup bisa diproyeksikan, partisipasi masyarakat akan lebih rendah, karena yang lebih banyak bekerja adalah mesin partai,” jelasnya lagi. ■ (sc) Foto: Run/ht

# Perombakan Kabinet Diserahkan Kepada Presiden

Isu perombakan atau *reshuffle* Kabinet Kerja sempat menjadi isu hangat, setelah Presiden Joko Widodo menyampaikannya di sela-sela saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto

“ Yang berhak menilai dan me-*reshuffle* kabinet adalah presiden. Seperti kita ketahui bahwa sistem kabinet kita adalah sistem presidensial, sehingga kabinet itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden,” kata Agus, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Politisi F-PD itu kembali menegaskan, jika terjadi perombakan, tentu kandidat terbaiknya pun menjadi kewenangan Presiden. “Semuanya kita serahkan kepada presiden,

karena sekali lagi presiden yang punya kewenangan untuk itu. Mana yang terbaik itu adalah kewenangan daripada presiden,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 lalu, Presiden Jokowi sedikit 'menyentil' Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Jokowi bicara soal target untuk Kementerian ATR/BPN mensertifikasi 5 juta

hektar lahan tahun ini, 7 juta hektare tahun depan, dan 9 juta hektare pada 2019. Menurut Jokowi, target itu tak pernah dipertanyakan oleh Menteri Sofyan.

“Saya bekerja selalu memakai target, jadi Pak Menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai, urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lain-lain,” kata Jokowi. ■ (sf/sc) Foto: Iwan/ht

# Penggunaan Hak Angket Untuk Dapatkan Pemahaman Komprehensif dari KPK

Pimpinan DPR RI dan Anggota Komisi III Taufiqulhadi dalam Sidang Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV TS 2016–2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4), menyetujui penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diusulkan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR RI.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini diwarnai sejumlah interupsi hingga aksi walk out dari anggota Fraksi Gerindra yang menolak penggunaan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Menanggapi berbagai interupsi dari sejumlah dewan, Fahri mengatakan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar digunakan setelah dilakukan hak bertanya di dalam AKD masing-masing.

Ia mengatakan, ini hanyalah ekstensi daripada penggunaan hak konstitusional yang diberikan undang-undang. Apabila dilakukan seperti proses biasa yakni pengawasan melalui Komisi maka tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Menurut Fahri, pengusulan hak angket ini semata untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan konkrit dari KPK.

"Kita sampai pada rapat hari ini karena

adanya rapat maraton Komisi III, dimana semua fraksi sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan penggunaan hak angket. Dilanjutkan rapat bamus, rapat pimpinan hingga rapat paripurna ini. Apakah usul menggunakan hak angket dapat disetujui?," ujar Fahri disusul pengetokan palu tanda persetujuan.

Sebelumnya Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada 17-19 April 2017. Dalam rapat tersebut, secara internal Komisi III mengusulkan penggunaan hak angket. Persetujuan ini kemudian diperkuat dengan usulan secara resmi sejumlah 25 anggota dari 8 fraksi yang mengajukan hak angket.

Anggota Komisi III Taufiqulhadi di depan Sidang Paripurna membacakan alasan usulan penggunaan hak angket yang mulai bergulir sejak adanya penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus E-KTP.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya," ujar politisi dari F-NasDem itu.

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh KPK dalam tata kelola anggaran maupun tata kelola dokumentasi, yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum. Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Cegah-Tangkal.

"Selanjutnya juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu," terangnya.

Pengajuan hak angket ini kata dia, dilakukan untuk melakukan pendalaman atas berbagai permasalahan diatas sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Selain itu, seluruh proses dan mekanisme penggunaan hak angket ini telah terpenuhi. ■

(amr,mp) Foto: Andri/hr

# Pemuda Muhammadiyah Dituntut Sebagai Penyeimbang Transformasi Kebangsaan

Pemuda Muhammadiyah harus menjadi penyulut semangat dalam memajukan bangsa. Selain itu, pemuda Muhammadiyah juga diimbau mampu menjadi penyeimbang atas isu-isu kontemporer politik di dalam negeri.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan bersama Ketua MPR dan Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam acara Milad Muhammadiyah ke-85

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan saat menghadiri Tasyakuran Milad ke-85 Tahun Pemuda Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Organisasi kepemudaan Muhammadiyah diminta konsisten menjalankan peran penyeimbang atas isu-isu keumatan dan kebangsaan.

"Kita mengucapkan selamat atas Milad ke-85 dari kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah. Tadi sangat baik refleksi perjalanan Muhammadiyah, yang tentunya ini bisa diharapkan memberikan penyemangat

pada generasi pemuda kita. Ada situasi perimbangan baru baik dari sektor ideologi politik, ekonomi, sosial budaya," ungkap Taufik Selasa (02/05) malam.

Pada acara bertajuk "Menggembirakan Dakwah Islam, Memajukan Indonesia Berkeadilan". Taufik menuturkan, pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu penyeimbang transformasi kultural, hendaknya lebih banyak berperan dengan semangat kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat.

"Kita mengenal ada transformasi kultural yang sedang berjalan. Ini sebagai pilar kontroling sosial dari pemuda

Muhammadiyah. Yang pasti dengan semakin dewasanya pemuda Muhammadiyah, akan semakin lebih matang, dalam kaitan untuk mewarnai perjalanan Republik ini," jelas Taufik.

Di sisi lain, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia merupakan watak dan karakter dari seluruh kader pemuda Muhammadiyah.

"Sesungguhnya keberagaman itu adalah genetika pemuda Muhammadiyah. Watak dan semangat dari seluruh kader pemuda Muhammadiyah," ujar Dahnil. Pesan keberagaman pada perayaan Milad tersebut tersirat saat Sammy Ginting, seorang seniman stand-up comedy tampil sebagai pembawa acara.

Dalam acara ini Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan sambutan. Dalam berdakwah, Muhammadiyah selalu menyerukan dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi, baik di lingkup internal Muhammadiyah maupun bagi bangsa dan negara.

"Karakter dakwah, itu 'nyeru' dan 'jamu', substansinya adalah demokratis. Karakter pembaharuan, dengan ilmu dan amal. Referensi keilmuan terus diwujudkan, karena realitas zaman tidak vakum," tuturnya.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang turut hadir dalam acara ini, berharap pemuda Muhammadiyah mampu membela hak-hak rakyat. Ia juga berharap Muhammadiyah bisa menjaga dan mengawal kepentingan rakyat. "Mampu membela hak-hak rakyat untuk membela keadilan hukum, untuk membela penegak hukum KPK yang sungguh-sungguh menegakkan korupsi, membela rakyat yang tertindas. Saya ucapkan selamat milad," kata Zulkifli. ■

# Gagasan Pendidikan Ki Hadjar Membakar Benih Kebodohan

Hari ini, 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional Setiap 2 Mei. Sejarah perjuangan pendidikan nasional yang dimotori oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. Ia seorang keturunan priyayi atau bangsawan yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Dia juga sangat peduli pada pendidikan untuk rakyat jelata. Ki Hadjar Dewantara bahkan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda.



Ketua DPR RI Setya Novanto

**K**etua DPR RI Setya Novanto mengingatkan bahwa Ki Hadjar Dewantara mampu membuka mata seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya Pendidikan. Jendela dunia pun mulai terbuka, seluruh perenungan dan pemikiran bangsa mulai bangkit. Ternyata, tak ada hukuman yang lebih menyedihkan dari terpenjara dan terbelenggu oleh kebodohan.

"Benih-benih kebodohan yang ditanamkan di ladang pemikiran rakyat

Indonesia oleh penjajah Belanda, terbakar hangus oleh pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara, sepulangnya beliau ke bumi pertiwi dari pengasingan di Belanda," papar Novanto dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (2/5).

Dia juga mengakui, kesuksesannya terinspirasi dari Ki Hadjar Dewantara. "Sejarah Ki Hadjar Dewantaralah yang menginspirasi dan menggerakkan saya untuk tetap maju dan berjuang agar tetap sekolah di tengah himpitan ekonomi keluarga saya saat itu," kenang Novanto.

Dia menceritakan, dulu nekat masuk ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa di Surabaya. Untuk meringankan biaya, dia bekerja sebagai sopir sekaligus pembantu agar tidak perlu membayar kos. Ia pun mendapatkan gaji untuk membiayai kuliah. "Saya juga mengisi waktu luang saya untuk berjualan beras di pasar, lalu menjadi tukang cuci mobil di sebuah dealer mobil di Surabaya, hingga menyelesaikan kuliah," ungkap Novanto.

Pemilik dealer mobil mengetahui bahwa Novanto kuliah jurusan akuntansi. Sang pemilik bertanya kepada Novanto bagaimana meningkatkan penjualan mobil

dan mengembangkan perusahaan. Novanto pun menjawab dengan memberikan gambaran planning perusahaan, sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. "Alhamdulillah pemikiran saya diterima, bahkan pemilik dealer mempercayakan saya untuk menjadi ketua penjualan mobil Indonesia bagian timur. Sampai akhirnya saya menjadi pengusaha nasional dan Ketua DPR RI," tuturnya.

Dia mengatakan, itu semua tak lepas dari pendidikan, semangat, dan kerja keras, sehingga hidupnya bisa berubah. Dia juga mengimbau kepada generasi muda, dari manapun asal-usulnya agar jangan takut melangkah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Masa depan bangsa ini akan rapuh jika anak bangsa tidak mengecap pendidikan yang cukup.

"Mari kita jadikan hari pendidikan nasional sebagai pelecut semangat belajar di negeri ini," seru Novanto. Dia juga berharap, agar jangan hanya merayakan Hari Pendidikan Nasional sekadar seremoni semata, tapi esensi dari pendidikan nasional juga patut diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. ■



## BKSAP DPR RI Apresiasi *Home Industry* Cokelat Makassar



Ketua BKSAP DPR RI Nuhayati Ali Assegaf saat kunjungan kerja Panja Kerja Sama Ekonomi Regional BKSAP di Makassar

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nuhayati Ali Assegaf mengapresiasi perkembangan *home industry* cokelat yang diproduksi masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan dari hasil kebunnya sendiri. Ia menilai rumah produksi cokelat itu merupakan inovasi kreatif masyarakat dalam meningkatkan kompetisi di era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

“Meskipun pembuatan cokelat masih manual, tapi ini merupakan inovasi kreativitas masyarakat dalam meningkatkan kompetisi global. Mereka itu memproduksi coklat rasa Green Tea yang biasa kita beli di luar negeri, ini kreatif sekali,” kata Nuhayati saat kunjungan kerja Panja Kerja Sama Ekonomi Regional BKSAP di Makassar, Rabu (26/4).

Untuk itu, politisi partai Demokrat itu berharap adanya peran pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi masyarakat Makassar ini, baik berupa modal maupun keahlian. “Perlu peran Pemda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi agar bisa berkompetitif. Sehingga produksinya banyak dan semua orang bisa menikmati cokelat asli Makassar ini,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya jika *home industry* cokelat ini berjalan dengan baik, akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. “Saya harap ini bisa dikembangkan, karena dampaknya juga baik, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau bahkan bisa dibuat jadi kampung cokelat. Jika ini berkembang saya yakin Makassar bisa menjadi contoh,” harapnya.

Selain itu, yang dibutuhkan selain modal, juga pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah dalam memasarkan produksi cokelat itu. “Pemda membina seperti pemasaran lewat online atau pendampingan. Makanya harapan kita tidak hanya mampu memproduksi tetapi bisa juga mengakses pasar dan finansial kebutuhan modal kerja,” pungkaskannya.

Ikut serta dalam Kunjungan Kerja ini, anggota BKSAP Syafullah Tamliha (F-PPP), Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Dave Akbarshah (F-Golkar), Mahfudz Sidik (F-PKS), Melani Leimena (F-Demokrat) dan Rachel Maryam (F-Gerindra). ■

(rief.mpi), foto: atieff/hr

## P3S Gelar Pasar Murah

Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI menggelar pasar murah dan bazar. Inilah pasar murah yang digelar jelang memasuki bulan suci Ramadhan. Berbagai kebutuhan menyambut Ramadhan tersaji di Plaza Nusantara II DPR RI.



Irtama Sekjen DPR RI Setyanta Nugraha membuka acara peringatan HUT P3S ke-48

Sebanyak 130 peserta pasar murah menggelar beragam dagangannya, Rabu (3/5). Acara ini sekaligus untuk memperingati HUT P3S ke-48 tahun. Hadir dalam pembukaan pasar murah itu Irtama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha dan para pengurus P3S.

Pasar murah digelar pada 3-5 Mei 2017 pukul 08.00-16.00 WIB. Di hari pertama pembukaan, pasar murah sudah diramaikan para pegawai yang melintas. Dari aneka kuliner, fashion, sampai perlengkapan rumah tangga tersaji lengkap di pasar murah ini. ■

(mbi), Foto: Iwan/hr

# PKH Percepat Perbaikan Ekonomi Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan dapat mendorong percepatan perbaikan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru 12 tahun berdiri.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain saat melakukan peninjauan lapangan objek Kemensos ke Penerima Manfaat PKH didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat di Lapangan Ahuni, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (02/05).

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005 silam, PKH di Sulbar, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKB ini, masih memerlukan proses adaptasi dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga harapan.

"Secara umum kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini untuk mengetahui kondisi faktual pembangunan di bidang agama,

sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti pimpinan agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya," terang Malik Haramain dalam sambutannya.

Politisi FPKB Dapil Jatim II ini juga menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI berperan membahas alokasi anggaran mitra kerja antara lain Kemensos. Kunjungan Kerja ini adalah bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan Komisi VIII untuk memastikan program kementerian berjalan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

"Hasil pantauan lapangan ini menjadi masukan bagi Komisi VIII dalam memutuskan

besaran anggaran pada tahun yang akan datang bersama pemerintah," ujar Malik Haramain.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim dan Anggota Kunker Komisi VIII secara simbolis memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat PKH berupa paket sembako melalui Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial.

Sekretaris Daerah Prov. Sulbar Ismail Zainuddin yang mendampingi acara kunjungan secara singkat memaparkan bahwa menurut data BPS bulan September 2014, jumlah penduduk miskin perkotaan di provinsi Sulawesi Barat adalah 29.870 jiwa atau 9,99%, sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 124.820 jiwa atau 12,67%. Secara keseluruhan penduduk miskin di provinsi Sulawesi barat 12,05% atau 154.690 jiwa dengan garis kemiskinan 246.524 (Rp/kapita/bulan).

Acara dilanjutkan peninjauan lapangan objek BPBD didampingi Kepala BPBD Provinsi Sulbar ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kab. Mamuju Tengah. Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini terdiri dari Abdul Malik Haramain (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII), Samsu Niang, Wenny Haryanto, Zulfadhli, Ruskati Ali Baal, Kuswiyanto, An'im F Mahrus, Achmad Mustaqim, Choirul Muna, M. Arif Suditomo. ■



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memantau Program Keluarga Harapan Kemensos di Sulbar

(olej). Foto: Olyhr



# Pemerintah Belum Benahi Pelayanan di RSUD Pulang Pisau



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau pelayanan Kesehatan BPJS di RSUD Pulang Pisau, Kalteng

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (Kalteng) belum dibenahi dengan baik. Akses dan penataan administrasi peserta BPJS Kesehatan juga belum diperbaiki.

Ini adalah temuan Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Kab. Pulang Pisau, Kalteng. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih dua jam dan melewati jembatan sepanjang 10 km di atas lahan gambut itu, ternyata mendapatkan banyak temuan serius. Temuan itu, misalnya, banyak peserta PBI belum menerima layanan kesehatan memadai. Padahal, mestinya mereka sudah bisa menerima. Lalu, peserta yang sudah meninggal juga masih menerima layanan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena di Kalteng, Rabu (3/5). Masalah lainnya, sambung Ermalena, adalah kasus double kartu dan peserta dengan umur yang berbeda. Kasus ini masih banyak ditemukan. Untuk itu, BPJS diserukan berhati-hati dalam menginput data peserta.

Pada bagian lain, ia juga menyoroti soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng yang melorot ke urutan 21 dari sebelumnya menempati urutan 10.

"Yang juga menjadi perhatian saya, turunnya IPM Kalimantan Tengah yang pada 2011 berada di urutan 10 besar, sekarang melorot ke urutan 21. Ada penurunan pelayanan pada indikator persalinan, kematian ibu dan anak, kurang gizi, dan lain sebagainya. Ini di bawah rata-rata nasional. Tentu ini jadi pertanyaan besar. Walaupun sudah ditambah DAK, itu masih belum mencapai standar yang diinginkan," ungkapnya.

Ditambahkan Ermalena, di Pulang Pisau terdapat 1 rumah sakit, 12 puskesmas, 75 puskesmas pembantu, 168 posyandu, 6 klinik, 5 dokter gigi, 8 dokter spesialis, 21 dokter umum, dan 334 perawat dan Bidan.

Data ini sebetulnya sangat bagus bagi daerah terpencil. Hanya saja, pelayanannya belum maksimal.

"Kabupaten Pulang Pisau merupakan Kabupaten peyanggah Kalimantan Tengah. Peserta BPJS saat ini di Pulang Pisau adalah 54%. Padahal, target 2019 seluruh warga negara Indonesia bisa menjadi peserta BPJS. Ini masih sangat jauh dan butuh kerja keras bagi direktur rumah sakit," kata politisi asal F-PPP ini.

Ermalena juga mengimbau pemerintah untuk memperhatikan layanan kesehatan di Kalimantan dan daerah timur lainnya. Ini demi mendapat keadilan yang merata dan bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Negara harus hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah layanan kesehatan di daerah yang saat ini cukup merisaukan. ■

# Komisi X DPR RI Dukung Penuh NTB Kembangkan Potensi Pariwisata

Gili Trawangan merupakan salah satu gugusan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menawarkan keindahan wisata alam terutama laut yang menawarkan keindahan terumbu karang dengan hamparan pantai yang jernih dengan pasir putihnya.



Komisi X DPR RI meninjau destinasi pariwisata di NTB

Gili Trawangan sudah sangat familiar di telinga wisatawan dunia, sehingga nyaris wisatawan Gili Trawangan didominasi oleh wisatawan asing. Potensi pariwisata di Gili Trawangan yang cukup besar tentu menjadi perhatian Komisi X DPR RI, karena NTB merupakan salah satu daerah yang memfokuskan pembangunannya pada dua sektor yaitu pariwisata dan pertanian. Sebagai mana disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya bahwa NTB merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki program jangka pendek maupun panjang yang hanya memfokuskan pada dua sektor yaitu pariwisata dan pertanian.

"Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi pariwisata dan wisatawan yang sangat tinggi, tentu jika potensi tersebut mampu dikembangkan dengan baik maka akan menjadi tulang punggung pendapatan suatu daerah dan tentu akan menjadi pemasukan negara yang cukup besar melihat potensi pariwisata Indonesia yang sangat tinggi," terang Riefky.

"Kita akan dukung penuh upaya Pemda NTB untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya, apalagi saat ini NTB sudah menjadi salah satu destinasi wisata, halal yang sedang gencar dipromosikan. Jika suatu daerah mampu mengembangkan potensi pariwisata

SDM nya harus terus ditingkatkan.

Riefky juga mengapresiasi bahwa di wilayah wisata Gili Trawangan tidak menggunakan kendaraan bermotor, sehingga menjaga kualitas udara dan tentu itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan bisa menggunakan sepeda maupun kuda yang telah disediakan.

Dalam kesempatan tersebut juga, Riefky berharap kualitas terumbu karang yang menjadi salah satu daya tarik di Gili Trawangan tetap bisa dijaga sehingga tidak mengurangi nilai keindahan Gili Trawangan. ■

daerahnya dan memberdayakan masyarakat lokalnya, maka kesejahteraan masyarakatnya pun akan terus berkembang," terangnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat ini menilai infrastruktur di Gili Trawangan sudah cukup baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain, namun untuk menuju standar internasional, masih banyak yang perlu diperbaiki di Gili Trawangan. Salah satunya pengelolaan sampah di sekitar lokasi, kemudian kualitas jalan dan penerangan malam hari di sepanjang jalan di Gili Trawangan serta kualitas



# Komisi IX DPR RI Minta RSUD Sukadana Prioritas Tingkatkan Alat Kesehatan dan Dokter Spesialis

Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Lampung memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, untuk meningkatkan fasilitas alat kesehatan dan menambah dokter spesialis.

Anggota Komisi IX Putih Sari, saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang membidangi kesehatan ini di RSUD Sukadana, mengatakan rumah sakit merupakan tumpuan utama dalam memberikan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di kabupaten yang memiliki luas wilayah 5.325 KM2.

"Secara potensi cukup baik, dan arealnya cukup luas. Memang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwa masih dibutuhkan peningkatan-peningkatan, yang utamanya adalah sumber daya manusianya seperti dokter-dokter spesialis yang masih kurang," katanya, di RSUD Sukadana, Lampung Timur, Rabu (03/05).

Komisi IX mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terutama dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, supaya bisa dibantu pemenuhan dokter-dokter spesialis.

"Sekarang juga pada Kementerian Kesehatan mempunyai program dokter spesialis wajib kerja, ini harus bisa diprioritaskan diberikan untuk RSUD Sukadana Lampung Timur," kata politisi Partai Gerindra ini.

Selanjutnya, kelengkapan alat medis RSUD Sukadana masih perlu ditingkatkan, dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan dinilai masih jauh dari kata lengkap. Seperti alat radiologi yang belum bisa dikatakan menunjang.

Putih Sari juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, untuk memprioritaskan pembangunan penunjang kesehatan tingkat I yaitu Puskesmas, karena Lampung Timur ini mempunyai wilayah yang cukup luas sehingga jangkauan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas

kesehatan tingkat I diutamakan.

"Fasilitas tingkat I yaitu Puskesmas ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap, DAK dari pusat diutamakan untuk pembangunan puskesmas dan melengkapi alat kesehatannya," katanya.

Lebih lanjut, Putih Sari menjelaskan pelayanan BPJS juga sudah terlayani dengan baik, hanya saja perlu ditambah petugas saat melayani pendaftaran. "BPJS diharapkan menambah supporting dari sisi SDM agar dapat menerangkan alur pelayanan di rumah sakit- rumah sakit," terang Wakil Rakyat dapil Jawa Barat VII (Purwakarta, Karawang, dan Bekasi).

Selain itu, masih kata Putih Sari, perlu juga ditingkatkan layanan puskesmas keliling untuk menjangkau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dengan tujuan mempermudah dan mendekatkan pada masyarakat untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

"Paradigma sekarang lebih kepada promotif dan preventif. Utamanya menyadarkan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan mencegah terjadinya penyakit," tutup Putih Sari. ■



Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari



www.asiandental.net

## Sistem Informasi Pajak Masih Bermasalah

DPR RI menilai sistem informasi perpajakan yang terintegrasi ke semua instansi pemerintah dan *stakeholder* lainnya masih bermasalah. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata tidak bisa mengakses data pajak. Ini yang berdampak menghambat kinerja DJP.



Suasana Rapat Tim Kunjor Komisi XI DPR RI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Ngurah Rai, Bali

Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Selasa (02/05). "Menurut saya problem ini tidak sepatutnya ada. Mungkin Komisi XI bisa meminta BPK untuk audit kinerja khusus urusan ini, bagaimana jembatan yang mengintegrasikan data antar-pemerintah bisa terbangun. Kita lihat, seperti apa solusinya," ucap Eva di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Ngurah Rai, Bali.

Isu ini, lanjut Eva, menjadi isu yang terus berulang setiap tahun dan menjadi hambatan struktural. Politisi PDI Perjuangan itu, mempertanyakan sikap pemerintah soal ini. Penyelesaiannya tinggal berharap pada good will pemerintah saja. Masalah ini menjadi perbincangan serius saat Komisi XI DPR menggelar pertemuan dengan Kanwil Kemenkeu, Kanwil BPK, Kanwil BPKP, Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, dan DJP Bali.

Pada bagian lain, Eva menyorot pula soal kinerja Bea dan Cukai dalam meraup penerimaan negara. Ia mengimbau agar

Bea dan Cukai ikut menumbuhkan kluster-kluster baru UMKM. "Bea dan Cukai harus berpikir keras bagaimana membina industri, menjaga agar tumbuh kluster-kluster UMKM baru yang diharapkan mampu menggenjot

penerimaan negara. Bea Cukai membantu meng-endorse, memfasilitasi, mengawasi, dan menginisiasi bagaimana industri UMKM bisa tumbuh dengan sehat," harapnya. ■

(rizka), foto: rizka/hr



Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Angraeni

## Komisi IV DPR RI Tinjau Hutan Adat di Pandumaan-Sapituhuta Sumut

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau langsung hutan kemenyan Pandumaan-Sipituhula di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara (Sumut), yang sudah disahkan menjadi hutan adat oleh presiden Joko Widodo. Sebelumnya, hutan ini adalah hutan konsesi PT. Taba Pulp Lestari (TPL).

“ Hari ini kami melihat, hutan kemenyan Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar sudah disahkan menjadi hutan adat melalui surat keputusan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata ketua rombongan kunker Edhy Prabowo di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumut, Selasa (2/5).

Lebih lanjut Edhy mengatakan, dirinya mengapresiasi bupati dan tokoh masyarakat yang telah menjaga dan mempertahankan tanah leluhur itu. “Saat ini, tinggal menunggu Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur hutan adat ini, agar ke depan tidak ada masalah,” jelasnya.

Politik Fraksi Gerindra itu, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan mendorong sampai Perdanya keluar. Sebab, hutan adat itu merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar.

“Dalam mengelola negara, kita tidak boleh



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Hutan Kemenyan Pandumaan-Sipituhula di Sumatera Utara

meninggalkan budaya. Pandumaan-Sipituhuta adalah daerah di Indonesia yang memiliki budaya yang tinggi dan melekat pada

masyarakat, maka ini harus dilindungi. Kami akan terus mendukung ini semua, selama ini untuk rakyat,” pungkasnya. ■

(rmm), Foto: Ria/fhr

## RUU Kepalaangmerahan Harus Ayomi Semua Ormas Kemanusiaan

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalaangmerahan harus segera rampung karena esensinya untuk melindungi masyarakat baik dalam keadaan perang maupun tidak.

“ RUU ini bisa segera rampung karena sifatnya kemanusiaan dan sangat ditunggu masyarakat,” kata Amel saapan akrobnya di sela-sela rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Dirjen Yankes Kemnkes RI, Dirjen HPI Kemenlu

dan Tagana Kementerian Sosial di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4).

“Jadi polemik mengenai lambang saya kira bisa dikompromikan. Harusnya ini tidak menjadi masalah karena di perjanjian Jenewa

ada 2 lambang yaitu Redcross atau Bulan Sabit, tinggal negara kita mau menggunakan yang mana, ini bisa dikompromikan,” lanjutnya.

Selain polemik lambang, lanjut politisi partai Nasdem itu Komisi IX saat ini sedang banyak mengundang stakeholder terkiat guna meminta masukkan mengenai hukum internasional yang berlaku, keterlibatan organisasi kemanusiaan yang ada selain Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bulan Sabit.

“Kami sedang meminta masukkan dari banyak pihak, tentang keterlibatan organisasi kemanusiaan yang ada di sini. Kami mau RUU ini bisa mengayomi semua organisasi kemanusiaan, sehingga mereka nanti terintergasi, ada garis koordinasi sesuai dengan pasal 33,” tuturnya. ■

(ria/mp), Foto: Ria/fhr

# Komisi V DPR RI Dorong Pembangunan Jembatan Holtekam Selesai Sesuai Jadwal

Komisi V DPR RI mendorong agar pembangunan Jembatan Holtekam di Jayapura, Papua, bisa cepat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD.

“Disadari, pembangunan jembatan ini ada kelemahannya. Pembiayaannya bukan saja dari APBN tetapi juga dari APBD Provinsi dan APBD Kota Jayapura”, kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V, Michael Watimena, saat mengunjungi Jembatan Holtekam di Jayapura, Rabu (3/5).

Ia berharap sinergitas ketiga segmen pembiayaan ini bisa saling padu menyelesaikan pembangunan Jembatan Holtekam itu, sehingga fungsi dari jembatan bisa terdorong dengan sendirinya. Diperkirakan pembangunan jembatan ini akan menelan biaya sebesar kurang lebih Rp900 miliar.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, MoU pembiayaan yang dibebankan kepada Kota Jayapura harus ditinjau kembali. Michael menambahkan bahwa jembatan Holtekam sangat seksi, karena memiliki fungsi yang sangat membantu terhadap proses pembangunan yang ada di Provinsi Papua.

Perencanaan pembangunan Holtekam sudah dimulai dari tahun 2015. Diharapkan pada akhir September 2018, jembatan ini akan rampung pembangunannya. Dan di akhir tahun 2018 itu pula jembatan ini sudah bisa digunakan. Jembatan Holtekam ini sendiri memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk

akses lalu lintas masyarakat di tengah populasi masyarakat kota setempat yang terus meningkat.

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, jembatan ini akan dimanfaatkan untuk membangun akses beberapa venue dalam PON 2020 yang digelar di Papua. Jarak tempuh juga kian pendek menuju ke perbatasan Papua Nugini. Dan pada beberapa titik di dekat Jembatan Holtekam ini, ada area-area wisata yang bisa menjadi destinasi wisata baik itu untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. ■

(sc), Foto: suci/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI mengunjungi Jembatan Holtekam di Jayapura





## Pemerintah Harus Tingkatkan Transportasi Air di Kalimantan Utara

Anggota Komisi V DPR RI, Capt. Djonny Rolindrawan, meminta Pemerintah segera memperbaiki dan meningkatkan sarana transportasi di Tanjung Selor, Tarakan Kalimantan Utara. Hal tersebut diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, beserta jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Balai Pertemuan Tanjung Selor, Kalimantan Utara Selasa (2/5).

[www.kapal-penumpang-pelni.blogspot.co.id](http://www.kapal-penumpang-pelni.blogspot.co.id)

**D**jonny menilai yang paling menyita perhatiannya selain infrastruktur adalah sisi transportasi di wilayah Tanjung Selor dan Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah Kalimantan didominasi jalur transportasi air, maka butuh juga pembangunan jalan trans Kalimantan guna memudahkan masyarakat Tanjung Selor, Kalimantan Utara menuju ke Kabupaten lainnya.

"Gunakan jalan air untuk sebagai transportasi tapi juga kan kalau misalnya menuju RS harus lewat air ya juga bisa saja malah kehilangan nyawa gitu ya. Saya kira memang infrastruktur jalan terutama harus ya apalagi terutama ini kan menyangkut martabat bangsa masa bangsa kita sampai jalan kaki berjam jam terus juga nyebrang ke negara lain hanya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Saya kira harus perbaiki segera," tutur Djonny.

Selain itu Djonny juga melihat dermaga pelabuhan Malundung dan Tengkeyu yang berada di Tarakan, Kalimantan Utara masih butuh peningkatan dari sisi pengadaan kapal kontainer sandar juga kapasitas pelabuhannya.

"Saya lihat tadi kan ada dermaga untuk barang ya, tadi ada kapal kontainer sandar

itu saya kira juga dengan satu jentik crane dan kapalnya hanya satu memadai dan juga pertahunnya masih sekitar 40 ribu Teu's (Ton Equivalen Units) ya sekarang

masih memadai tapi 5 tahun ke depan saya kira harus dilipatkan paling tidak 2 sampai 3 kali lipat dari sekarang," Ucap politisi fraksi Hanura. ■

(ndy) Foto: Nadya/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Balai pertemuan Tanjung Selor di Kaltara

## Penyelesaian Kawasan Dangku II Bisa Dukung Reforma Agraria

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengharapkan penyelesaian kasus tanah kawasan Dangku II Sumatera Selatan perlu dilakukan. Penyelesaian tanah di kawasan marga satwa (konservasi) tersebut bisa mendukung program reforma agraria yang dicanangkakan Presiden Joko Widodo.

**H**al itu dikatakannya usai Pertemuan dengan Gubernur Sumsel diwakili Sekda dan jajaran terkait membahas masalah kawasan margasatwa Dangku II di Palembang, Rabu (26/4)

Berdasarkan UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam kawasan itu tidak boleh untuk kepentingan lain kecuali untuk kelestarian satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Ternyata kawasan itu sejak 1985 sudah dirambah jadi kebun sawit oleh 4 perusahaan serta banyak masyarakat mendiami lokasi itu.

Darori yang juga mantan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemen LHK mengatakan, Komisi IV perlu meninjau lokasi sesuai informasi luas lahan 70 ribu ha sebagian besar kebun sawit dan karet ada transmigrasi dan pengeboran minyak oleh Conoco. "Saya kira kalau untuk rakyat perlu dipertimbangkan, jangan mengusir rakyat. Kalau mengusir harus dipindahkan ke lokasi yang lebih layak dan lebih baik," katanya.



www.2.bp.blogspot.com

Dengan penyelesaian kawasan Dangku tersebut, Darori mendukung program reforma agraria yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi menggunakan kawasan 4 juta ha lebih. "Maka saya setuju, tapi tanah ini jangan hak milik tapi hak pakai nanti dijual, dipakai turun temurun. Seumur hidup turun temurun diprioritaskan bagi masyarakat kita yang tinggal di sekitar hutan jumlahnya hampir 40 juta yang tak punya tanah," tandasnya.

Mestinya lanjut Darori, masalah ini yang diprioritaskan dipindahkan, disahkan, disetujui untuk berusaha di kawasan hutan yang menjadi hak pakai. "Pengalaman saya, tanah-tanah transmigrasi bersertifikat dijual, kembali lagi daftar lagi menjadi transmigran. Bahkan hak ulayat juga dijual, sekarang punya anak dan menjadi transmigran di kampung sendiri," katanya.

Dia menambahkan, sebaiknya hak pakai, bisa seumur hidup bahkan turun temurun. Kalau disertifikat, sudah ditunggu cukong-cukong langsung secara instan dapat duit. Mereka tidak memikirkan anak cucunya. ■



Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro

(Imp). Foto: Andri/Oji

## Pembangunan TTP Harus Terintegrasi dengan Potensi Lokal

Komisi IV DPR RI mengapresiasi positif pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Kementerian Pertanian di beberapa daerah pengembangan kawasan ataupun komoditas. Hal ini disampaikan oleh Herman Khaeron pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Nglanggeran, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (27/04).

**H**erman mengatakan, hasil yang diperoleh di beberapa TTP cukup baik, bahkan memuaskan. "TTP hari ini di Gunung Kidul, saya kira kita dapat melihat, baik dari sarana infrastruktur dan kegiatan yang berlangsung di sini juga cukup baik sehingga

# Soal Ganti Rugi Pemkot Balikpapan Harus Kedepankan Dialog

Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Nasyit Umar, mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus serius menangani masalah ganti rugi hutan lindung Manggar. Menurutnya Pemkot harus duduk bersama berdialog dengan para pihak yang berkonflik, yakni masyarakat pendatang dan masyarakat asli daerah.

“Pihak-pihak yang berkonflik itulah yang penting untuk dipikirkan tentang bagaimana mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi di hutan lindung Manggar,” ujar Nasyit Umar di sela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (3/5).

Ketika sudah ditemukan kesepakatan antara para pihak, lanjutnya, maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan merelokasi masyarakat yang masih bertempat tinggal di dalam kawasan hutan lindung Manggar tersebut.

“Mereka harus direlokasi ke daerah yang identik dengan status pekerjaan masyarakat seperti di lokasi yang sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa kehilangan mata pencahariannya. Namun, tentu dilakukan dengan sistem atau tata cara yang berlaku pada saat sekarang,” ucapnya.

Nasyit mengaku bahwa dirinya telah

m e m i l i k i pengalaman d a l a m masalah ganti rugi tanah, seperti saat d i r i n y a menyelesaikan Waduk Bili-Bili d a n Bendungan Ponde-Ponde. “Semua kami selesaikan tanpa ada masalah. Oleh karenanya, persoalan

yang terjadi di hutan lindung Manggar itu harus segera diatasi dengan baik. Terkait masalah anggarannya bisa dilakukan



Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi Hutan Lindung di Kalimantan Timur

sharing antara Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat,” tandas Nasyit. ■

(dep), Foto: Dep/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Nglangeran, Daerah Istimewa Yogyakarta

kompetensi lokal,” ujarnya.

Menurutnya, Gunung Kidul mempunyai potensi budidaya kakao dan kambing Etawa. Pasalnya, kulit atau cangkang kakao bisa untuk pakan kambing etawa. “Dari kambing e t a w a j u g a menghasilkan pupuk organik untuk memberikan daya dukung pupuk terhadap kakao dan kita dapat melihat

bagaimana ibu-ibu kelompok tani di sini mengelola fasilitas yang ada dari kakao menjadi berbagai jenis makanan yang bisa

dikonsumsi,” ucapnya.

Hal ini tentu juga terintegrasi dengan kawasan wisata, sehingga dalam pandangan Komisi IV ke depan memang pembangunan TTP harus terintegrasi dengan potensi lokal. “Potensi lokal apa yang bisa dikembangkan seperti di sini produk-produk hasil pengembangan wanita taninya ini bisa dijual kepada para pengunjung wisata di sini, karena ini adalah daerah wisata. Ada embung ngelangeran dan ada gunung api purba yang saya kira tepat sekali,” lanjutnya.

Dalam penutupnya pada wawancara dengan para wartawan, Herman juga berpendapat bahwa selain menjadi objek wisata, juga bisa menjadi objek pembelajaran bagi siapapun yang tertarik dengan komoditas pertanian yang tentu bisa dikembangkan dengan cara-cara modern dan lebih baik. ■

(eno), Foto: Kresno/hr

ke depan barangkali ini bisa dijadikan semacam pilot project yang bisa ditingkatkan sebarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

# Kelebihan Kapasitas Lapas Tak Perlu Terjadi

Kelebihan kapasitas (over capacity) Lapas sebetulnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 pertumbuhan Lapas sudah cukup baik. Ketua Tim Kunker Komisi III Desmond J. Mahesa mempertanyakan apakah kelebihan kapasitas lapas bersumber dari luar, selain itu apakah Kepolisian dan BNN melakukan penanganan dengan baik.

“ Penangkapan itulah yang membuat over kapasitas. Sedangkan pencegahannya bagus atau tidak,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa, usai meninjau Lapas Kelas II Mataram, NTB Selasa (2/5) siang. Persoalan kelebihan kapasitas terjadi di seluruh Indonesia tak terkecuali di NTB yang berkapasitas 250 orang. Namun, dihuni 800 orang lebih.

Menurut Desmond, itulah masalahnya bahwa kelebihan kapasitas karena penangkapannya lebih banyak dibanding pencegahannya. “Ini yang akan kita evaluasi terhadap kinerja BNN. Kalau ada narkoba beredar di dalam Lapas, masalahnya di luar atau di dalam, kan, di luar. Berarti badan ini enggak beres. Jangan Lapas yang disalahkan,” tandasnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kunker ke NTB ini untuk evaluasi hal-hal sederhana. Dari laporan yang diterima Lapas



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa

se-Nusa Tenggara dari aspek penangkapan, kasus narkoba berjalan baik. Berarti gagal di bidang pencegahan. “Jangan ngaku berhasil tangkap orang, itu berarti gagal dalam pencegahan,” katanya lagi. Ditekankan lagi bahwa kalau di luarnya beres, maka tidak

ada narkoba di Lapas.

“Tidak mungkin ada peredaran narkoba dalam lapas kalau di luarnya beres,” tekan dia. Kunjungan ke Lapas ini termasuk Lapas wanita, Tim Komisi III menerima masukan, salah satunya HP yang di dalamnya ada dokumen penting yang dihilangkan oleh petugas. Masalah ini akan ditindaklanjuti termasuk memanggil pengacara wanita terpidana kasus pembunuhan. Di Lapas wanita ini ada dua bayi yang ibunya terjerat kasus narkoba.

Dalam kunker kali ini ikut serta anggota-anggota Komisi III Ichsan Soelistio dan Eddy

Kusuma Wijaya dari FPDIP, Adies Kadir dan Ahmad Zacky Siradj (FPG), Wihadi Wiyanto dan Didik Mukrianto (FPD), M. Toha dan Rohani Vanath (F PKB), Arsul Sani dari FPP, Akbar Faisal dari Nasdem, dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura). ■

(imp). Foto: Mastur/Oji

## Sertifikasi Tanah Lambat, Legislator Evaluasi Prona

Anggota Komisi II DPR RI, Sutriyono, mengaku akan mengevaluasi perkembangan Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal itu dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan terkait lambatnya proses sertifikasi tanah. Demikian disampaikan saat ditemui di Ruang Kerjanya pada Kamis, (28/4).

Lambatnya sertifikasi tersebut diakui Sutriyono karena adanya kendala anggaran yang kini pemerintah pusat hanya menganggarkan sertifikat saja tanpa membebrikan anggaran pada biaya penguluran dan patok.

“Prona itu, pemerintah pusat hanya menganggarkan sertifikatnya. Tidak ada anggaran untuk pengukuhan dan biaya patok. Makanya di Jawa Timur itu ada sekitar 17 kepala desa yang tersangkut masalah pronan ini,” ujar Sutriyono.

Politisi PKS ini pun mengingatkan agar Pemerintah dalam membuat Prona itu harus tuntas, sehingga hasilnya dapat dinikmati secara cepat oleh masyarakat. “Ini koreksi juga saat pemerintah bikin Prona itu harus tuntas. Jangan pemerintah pusat ngasih,

# Pendidikan Sebagai Cara Kurangi Kriminalitas

Peran pendidikan sangat penting dalam aspek pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Sehingga diharap dapat mengurangi *overcapacity* yang umumnya terjadi di Lapas berbagai daerah.

**S**alah satu aspek pembinaan perlu dilakukan kepada narapidana dengan kategori anak-anak, sehingga jika diberikan pengarahan akan bisa membawa perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Nawafie Saleh kepada Parlemen usai meninjau Lapas Kelas II A, Palu, Selasa, (2/5).

"Anak-anak harus diberikan pendidikan. Saya setuju, kan, ada paket B dan paket C. Nah, keluar dari penjara bisa ikut paket C, kan. Kita tahu bahwa menyelesaikan jenjang SMP adalah kewajiban. Tadi ditanya, ada anak usia SMP yang belum berijazah," ujar Nawafie.

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa perlakuan antara narapidana usia anak-anak dengan usia dewasa harus ada perbedaan. "Memang perlakuannya harus beda, ya



Anggota Komisi III DPR RI, Nawafie Saleh

antara yang dewasa dengan yang anak-anak," sambungnya.

Meningkatkan kualitas binaan itu penting untuk mencegah narapidana

melakukan kejahatan yang sama usai keluar dari penjara, karena dirinya berpandangan Indonesia tidak mungkin terus menerus fokus untuk penambahan jumlah Lapas. Ketimbang membangun lapas, Nawafie berpandangan lebih baik anggarannya digunakan untuk membangun sekolah.

"Pendidikan program ideal yang harus dilakukan. Kalau pendidikannya bagus, kan, bisa mengurangi tindak kejahatan. Lebih baik bangun SMP atau SMA ketimbang membangun penjara," jelas Nawafie.

Dalam kunjungannya kali ini, Nawafie juga meminta selain pembinaan yang diperkuat, infrastruktur Lapas juga perlu menjadi perhatian. "Tadi saya lihat

ada yang di ruangan sangat sempit. Kadang ada yang bergantian untuk bisa masuk. Jadi, ya kalau kelebihan kapasitas itu betul adanya," tutupnya. ■

(hs), Foto: Hendra/Oj



Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono

tapi tidak bisa dieksekusi. Dan kalau semua Pemda tidak memberikan anggaran, itu tidak jalan juga. Karena pengukuran tidak dianggarkan disitu, hanya sertifikatnya saja," jelas Sutriyono.

Evaluasi terhadap perkembangan Prona ini akan ditindaklanjuti saat Rapat Kerja dengan Menteri ATR di masa sidang selanjutnya. Sutriyono pun mengaku akan mengingatkan pemerintah untuk tetap fokus dalam capaian target Prona ini. "Kita akan rapat agi. Kita akan cek laporan perkembangan Prona. Ini sudah masuk triwulan pertama 2017. Kalau targetnya 2500, kan bisa dilihat capaian selama 4 bulan ini seperti apa," pungkas Sutriyono. ■

(hs,mp), Foto: Jayadi/hr

# Sarana Prasarana Sekolah di Kubu Raya Masih Minim

Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berlangsung pada 2,3,4, dan 8 Mei 2017, namun dari 220 SMP di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan UN, faktanya hanya dua sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu menunjukkan masih minimnya infrastruktur dan sarana prasarana sekolah di Kubu Raya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Fakhri, usai pertemuan dengan Wakil Bupati Kubu Raya beserta jajaran di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalbar, Selasa (02/05). Pertemuan ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kalbar.

"Dari 220 SMP yang melaksanakan UN hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Ini gambaran bahwa infrastruktur dan sarana prasarana masih minim. Sehingga sekolah untuk melaksanakan UNBK, masih sangat sedikit. Saya kira ini perlu perhatian," tegas Fikri.

Politisi F-PKS itu mengakui, kemampuan fiskal daerah yang juga minim, turut mempengaruhi kondisi sarpras pendidikan. Sehingga, bantuan dari Pusat pun sangat dibutuhkan oleh daerah.

"Saya kira fiskal daerah terbatas. PAD Kabupaten dan Kota di bawah 10 persen dari APBD mereka. DAU maupun DAK yang dimiliki Kabupaten dan Kota itu sebagian besar dari pusat. Ini harus cermat betul, dan kementerian terkait harus terlibat langsung," dorong Fikri.

Terkait sarpras ini, Fikri menambahkan, pihaknya baru saja menyelesaikan Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, dan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan, rekomendasi ini dapat mengurai permasalahan mengenai minimnya sarpras pendidikan.

"Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti rekomendasi Panja. Karena bukan hanya masalah sekolah rusak, dari 1,8 juta ruang kelas yang ada, setidaknya 1,3 juta ruang kelas mengalami kerusakan. Namun, itu belum berbicara tentang perpustakaan, laboratorium,



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau sarpras di SDN 39 Sungan Kakap, Kubu Raya

dan lainnya," imbuh Fikri.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah itu pun menyoroti mengenai penerapan kurikulum. Menurutnya, penerapan kurikulum masih menjadi problematika, karena daerah masih ada yang menggunakan KTSP dan Kurikulum 2013.

"Ini mau pakai Kurikulum 2013 atau KTSP, ternyata ini menjadi problematika besar. Kementerian terkait harus menetapkan kejelasan mengenai kurikulum yang akan digunakan, karena elemen pendidikan menjadi bingung. Dan ini mempengaruhi sarana prasarana yang harus disiapkan. Tentu sarpras untuk Kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP," jelas Fikri.

Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Hermanus, menjelaskan dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya,

hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Sisanya masih menerapkan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.

"Permasalahannya masih lambatnya Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, dan termasuk masih minimnya siswa yang mampu mengoperasikan komputer. Ini kendala kita ketika akan melaksanakan UNBK," jelas Hermanus.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Hendra (F-Gerindra, dapil Jambi), dan beberapa Anggota Komisi X DPR RI diantaranya Mujib Rohmat (F-PG, dapil Jateng), Iwan Kurniawan (F-Gerindra, dapil Kalteng), Lathifah Shohib (F-PKB, dapil Jatim), dan Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem, dapil Jatim). ■

(sf). Foto: Sofyan/hr



## Parlemen Kampus 2017 Dibuka di Unsika Karawang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria didampingi Sekjen DPR RI dalam acara Sekolah Parlemen Kampus 2017

Sekolah Parlemen Kampus 2017 resmi dibuka di kampus Unsika, Karawang, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI A. Riza Patria secara simbolis membuka acara ini sekaligus membuka pula Seminar Nasional "Pemilu Nasional Serentak 2019: Dinamika dan Tantangannya". Acara diikuti 250 mahasiswa dari 11 Perguruan Tinggi yang berada di Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang.

Sedianya, kegiatan Sekolah Parlemen Kampus 2017 ini akan dibuka Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Namun, karena ia terhambat kemacetan di jalan tol, acara pun dibuka Riza Patria. Sekolah Parlemen Kampus 2017 ini, diselenggarakan atas kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

"Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik dan menjadi penting. Sekarang bangsa-bangsa di dunia mengedepankan pentingnya sebuah demokrasi dan kedaulatan bangsa," kata Ariza, sapaan akrab A. Riza Patria dalam sambutannya di Aula Kantor Bupati Karawang, Sabtu (29/4).

Kegiatan ini, lanjut Riza yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, merupakan

perencanaan edukasi dan implementasi yang penting bagi kita semua khususnya generasi muda. "Tidak hanya untuk memahami undang-undang, tapi jauh lebih penting adalah untuk mengikuti proses demokrasi. Dan yang paling penting pada akhirnya bisa terlibat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat khususnya melalui pilkada maupun pemilu nasional," paparnya.

Dan nantinya, kata Riza, diharapkan melalui pilkada maupun pemilu nasional dapat menghasilkan kepala daerah, anggota legislatif, dan presiden serta wakil presiden yang terbaik yang dapat memajukan daerah, bangsa, dan pada akhirnya dapat menyejahterakan seluruh rakyat di daerah dan di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara pembukaan Sekolah Parlemen Kampus 2017 antara lain,

Bupati Karawang Cellica Nuraciana, Wakil Ketua DPRD Karawang Ajang Sofandi, Sekjen DPR RI Acmad Djuned, Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk, dan Rektor Unsika Wahyudin Zarkasyi, serta beberapa Anggota DPRD Karawang.

Pada acara pembukaan Sekolah Parlemen Kampus 2017 ini dimeriahkan pula dengan Tari Jaipong yang ditampilkan salah satu mahasiswi Unsika Karawang. Rangkaian kegiatan Sekolah Parlemen Kampus 2017 selain diisi Seminar Nasional, juga diisi simulasi Sidang Paripurna DPR RI yang dilakukan oleh 100 mahasiswa terpilih.

Selain Riza, hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Wakil Ketua DPRD Karawang Ajang Safandi, Lili Romli dari LIPI, dan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Demokrasi August Mellaaz. ■

(es). Foto: Rumi/hr



Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Korkesra Fahri  
Hamzah menerima  
Audiensi Rumah Al-Qur'an  
Violet (Kamis, 4/5)  
Foto:Jayadi.



Tim Biro Pemberitaan Parlemen dipimpin Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si melaksanakan kegiatan monitoring pengiriman Majalah dan Buletin Parlemen ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pos Kendari dan Polres Kabupaten Wakatobi, Rabu, (3/5) Foto : istimewa

**POLRES WAKATOBI**



Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Saleh Partaonan Daulay meninjau RSUD Kota Bengkulu, RS M. Yunus, Provinsi Bengkulu (Rabu, 3/5) Foto:Anne.